



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS

TAHUN 2025–2029

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Penilaian 2026

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan RTP mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP Strategis, diharapkan seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Desember 2025


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS
OMAR UDAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770101 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABELiv

BAB I GAMBARAN UMUM..... 2

 A. Latar Belakang..... 2

 B. Dasar Hukum..... 2

 C. Maksud dan Tujuan..... 3

 D. Ruang Lingkup..... 3

BAB II LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN 5

 A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini 5

 B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 5

BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 7

 A. Penetapan Konteks/Tujuan 7

 B. Hasil Indentifikasi Risiko 10

 C. Hasil Analisis Risiko..... 11

 D. Pengendalian yang sudah dilakukan 13

 E. Pengendalian yang masih dibutuhkan 16

BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 18

BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN 17

BAB VI PENUTUP 16

LAMPIRAN 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tujuan, Sasaran Strategis Dinas Perhubungan 2025 – 2029..... 4

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian..... 5

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINAS PERHUBUNGAN (IKU DINAS PERHUBUNGAN) 8

Tabel 4. 2 Resiko Strategis OPD..... 9

Tabel 4. 3 Level Resiko Strategis OPD..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas menyadari sepenuhnya pentingnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Atas dasar kesadaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus menyelenggarakan dan memperkuat penerapan SPIP secara berkelanjutan.

Agar sistem pengendalian intern yang dibangun dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perancangan pengendalian yang tepat dan terarah. Oleh karena itu, disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai pedoman dalam menentukan arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RTP Strategis diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dan sasaran kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP Strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Banyumas;

- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian risiko strategis dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, guna memastikan pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Perhubungan secara efektif, efisien, serta akuntabel.

2) Tujuan

mengidentifikasi dan mengendalikan risiko strategis secara terukur dan terintegrasi dengan perencanaan serta penganggaran untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mendukung penerapan SPIP Terintegrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menjamin keberlanjutan program dan kegiatan sesuai kebijakan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup

RTP Strategis ini difokuskan pada pengendalian atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama dalam rangka mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan dan seluruh jenjang manajemen hingga pegawai dan unit kerja terkait.

Penyusunan RTP Strategis Tahun 2025–2029 mengacu pada tujuan strategis dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dengan dilakukan identifikasi risiko sebagai upaya mitigasi terhadap potensi kejadian yang dapat menghambat pencapaian target kinerja. Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 berdasarkan Renstra 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tujuan, Sasaran Strategis Dinas Perhubungan 2025 – 2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1	Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau	Rasio konektivitas Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	SASARAN	
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	Indeks konektivitas angkutan jalan Indeks konektivitas angkutan Sungai VC Ratio di Jalan Kabupaten
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Secara umum, kondisi lingkungan pengendalian di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berada pada tingkat yang cukup memadai. Penilaian terhadap lingkungan pengendalian tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan sistem pengendalian internal, dengan hasil penilaian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian

No.	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan Peran Apip Yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Adapun Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I :

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

- Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas*
- Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas*

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah **“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera”**. Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Bupati Banyumas menetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia;
- b. Menguatnya ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan mensejahterakan;
- c. Meningkatnya ketahanan pangan;
- d. Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
- e. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing; dan
- f. Meningkatnya keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Ke-enam misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko Dinas Perhubungan (IKU Dinas Perhubungan)

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	2026		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Perhubungan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas		
Sumber Data	Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau		
Sasaran Strategis Renstra	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD		IKU	TARGET 2029
	1	Rasio konektivitas	0.785
	2	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55.99%
	3	Indeks konektivitas angkutan jalan	0.8
	4	indeks konektivitas angkutan sungai	0.75
	5	VC Ratio di Jalan Kabupaten	0.74
	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88.9
	7	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.526
	8	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3.5
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
	Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau		
	Sasaran Strategis:		
	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
	IKU Strategis:		

	Rasio konektivitas
	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Indeks konektivitas angkutan jalan
	indeks konektivitas angkutan sungai
	VC Ratio di Jalan Kabupaten
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
	Nilai SPIP Perangkat Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas*

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 8 (delapan) risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Risiko Strategis OPD

NO	PERNYATAAN RISIKO
A	Risiko Strategis OPD
1.	Belum meratanya pemenuhan rute dan angkutan yang dibutuhkan masyarakat di wil. Bms
2.	Belum optimalnya pemberian layanan kepada penumpang
3.	Masih terdapat ruas jalan di Kabupaten Banyumas yang mengalami kepadatan tinggi
4.	Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi
5.	Adanya aduan atas pelayanan perangkat daerah

NO	PERNYATAAN RISIKO
6.	Belum efektifnya pencapaian tujuan Perangkat Daerah

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

C. Hasil Analisis Risiko

1) Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Setelah proses analisis risiko dilaksanakan, diperoleh hasil identifikasi risiko yang selanjutnya dianalisis menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penetapan nilai kemungkinan dan dampak risiko dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kepala Bidang, Sekretaris, serta Kepala Dinas Perhubungan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil proses tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut :

Risiko Strategis OPD

Tabel 4. 3 Level Resiko Strategis Opd

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
1	Sedang	Belum meratanya pemenuhan rute dan angkutan yang dibutuhkan masyarakat di wil. Bms
		Masih terdapat ruas jalan di Kabupaten Banyumas yang mengalami kepadatan tinggi
2	Rendah	Belum optimalnya pemberian layanan kepada penumpang
3	Sangat Rendah	Adanya aduan atas pelayanan perangkat daerah
		Belum efektifnya pencapaian tujuan Perangkat Daerah
		Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko.

2) Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, “Rendah sampai dengan Tinggi” serta risiko pilihan dengan nilai rendah yang tetap dilakukan mitigasi melalui rencana tindak pengendalian. Terhadap risiko

yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

5) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

6) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggungjawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

7) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

8) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I Form 8 (kolom a – f).

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

9) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I Form 9 (kolom a – e).

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

10) Mencatat Keterjadian risiko (*risk event*) dan RTP Strategis

Rencana Tindak Pengendalian perlu mencatat keterjadian risiko ketika risiko tersebut terjadi pada saat kegiatan berlangsung dan melakukan mitigasinya untuk mereduksi potensi dampak selanjutnya. Rancangan keterjadian risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I Form 10 (kolom a – j).

(Form 10 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan dikaitkan secara langsung dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Pengendalian tersebut ditujukan untuk meminimalkan risiko Strategis dan risiko pelaksanaan kegiatan. Adapun aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan tim pelaksana untuk kegiatan atau pekerjaan tertentu melalui penetapan Surat Keputusan, meliputi PA, KPA/PPK, PPTK,

Sekretariat kegiatan, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP, dan pihak terkait lainnya;

2. Pendataan serta pembinaan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap seluruh tahapan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Perhubungan telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
- b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- c. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Nomor 500.11/4068 Tahun 2025 Tentang PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025;

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2026 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah pengendalian yang akan diterapkan untuk mengatasi kelemahan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perhubungan perlu mengomunikasikan pengendalian tersebut kepada para pihak terkait, antara lain Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, serta para pelaksana kegiatan. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi mengenai pengendalian telah disampaikan secara jelas dan dipahami oleh semua pihak sesuai dengan rencana komunikasi yang tercantum dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merumuskan strategi komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan perbaikan pengendalian yang akan diterapkan. Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sebagaimana direncanakan dalam RTP Strategis meliputi:

1. Penerbitan Surat Edaran Bupati kepada unit kerja terkait sebagai dasar pemberlakuan kebijakan;
2. Publikasi kebijakan melalui situs resmi Pemerintah Daerah, antara lain pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, workshop, atau diseminasi yang didukung dengan bukti pelaksanaan, seperti undangan, notulen atau laporan kegiatan, daftar hadir, serta dokumentasi foto.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2025-2029 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan RTP mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP Strategis, diharapkan seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Desember 2025


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS
OMAR UDAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770101 199603 1 002

LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD		
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS		
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	2026	
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029	
Urusan Pemerintahan	: Perhubungan	
OPD yang Dinilai	: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	
Sumber Data	Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	
Tujuan Strategis Renstra	Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau	
Sasaran Strategis Renstra	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	
IKU Renstra OPD		IKU
		TARGET 2029
	1	Rasio konektivitas
	2	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	3	Indeks konektivitas angkutan jalan
	4	indeks konektivitas angkutan sungai
	5	VC Ratio di Jalan Kabupaten
	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	7	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
	8	Nilai SPIP Perangkat Daerah
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:	
	Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau	
	Sasaran Strategis:	
	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	
	IKU Strategis:	
	Rasio konektivitas	
	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
	Indeks konektivitas angkutan jalan	
	indeks konektivitas angkutan sungai	
	VC Ratio di Jalan Kabupaten	

	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
	Nilai SPIP Perangkat Daerah
	Putuwokerto, Desember 2025 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS  OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si NIP.19770104 199603 1 002

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau
 Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah
 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah"
 Urusan Pemerintahan : Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Tujuan:								
	Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau	Rasio konektivitas							
		Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan							
	Sasaran :								
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	Indeks konektivitas angkutan jalan	Belum meratanya pemenuhan rute dan angkutan yang dibutuhkan masyarakat di wil. Bms	Kepala Dinas	Rute Trayek yang tersedia sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat	Eksternal	C	Masih banyak masyarakat yang tidak terlayani angkutan umum	Masyarakat
		indeks konektivitas	belum optimalnya pemberian	Kepala Dinas	sarana prasarana dermaga belum memenuhi SPM	Internal	C	Kenyamanan dan Keamanan Penumpang belum optimal	Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		angkutan sungai	layanan kepada penumpang						
		VC Ratio di Jalan Kabupaten	Masih terdapat ruas jalan di Kabupaten Banyumas yang mengalami kepadatan tinggi	Kepala Dinas	belum optimalnya Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas	Internal	C	Aktifitas masyarakat dan distribusi barang/kebutuhan terhambat	Masyarakat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi	Kepala Dinas	Kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya kinerja	Internal	C	Kinerja Organisasi tidak tercapai	OPD
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Adanya aduan atas pelayanan perangkat daerah	Kepala Dinas	Kurang Optimalnya Pelayanan Perangkat Daerah	Internal	C	ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pelayanan perangkat daerah	OPD
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Belum efektifnya pencapaian tujuan Perangkat Daerah	Kepala Dinas	Kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya kinerja untuk mencapai Tujuan Perangkat Daerah	Internal	C	Kinerja Organisasi tidak tercapai	OPD

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau
 Urusan Pemerintahan : Perhubungan

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	B	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Belum meratanya pemenuhan rute dan angkutan yang dibutuhkan masyarakat di wil. Bms	2.50	4.00	10.00
2	belum optimalnya pemberian layanan kepada penumpang	2.20	2.70	5.94
3	Masih terdapat ruas jalan di Kabupaten Banyumas yang mengalami kepadatan tinggi	2.50	4.10	10.25
4	Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi	2.10	2.10	4.41
5	Adanya aduan atas pelayanan perangkat daerah	2.20	2.20	4.84
6	Belum efektifnya pencapaian tujuan Perangkat Daerah	2.30	2.10	4.83

	Sangat Rendah
	Rendah
	Sedang
	Tinggi
	Sangat Tinggi

FORMULIR KERTAS KERJA**DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau
 Urusan Pemerintahan : Perhubungan

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	D	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Belum meratanya pemenuhan rute dan angkutan yang dibutuhkan masyarakat di wil. bms	10.00	Kepala Dinas	Rute Trayek yang tersedia sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat	Masih banyak masyarakat yang tidak terlayani angkutan umum
2	Masih terdapat ruas jalan di Kabupaten Banyumas yang mengalami kepadatan tinggi	10.25	Kepala Dinas	belum optimalnya Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas	Aktifitas masyarakat dan distribusi barang/kebutuhan terhambat

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau
 Urusan Pemerintahan : Perhubungan

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Belum meratanya pemenuhan rute dan angkutan yang dibutuhkan masyarakat di wil. bms	Telah disediakan program bus sekolah gratis, pariwisata gratis, dan BRT Trans Banyumas	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Dokumen hasil Survey rute angkutan umum terbaru sesuai kebutuhan masyarakat wil. kab bms (perkotaan)	Kepala Dinas	2026
2	Masih terdapat ruas jalan di Kabupaten Banyumas yang mengalami kepadatan tinggi	Pembatasan lalu lintas dengan penerapan SSA pada jalan jalan utama yang memiliki beban lalu lintas yang tinggi dan penyediaan angkutan massal bus trans banyumas	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Dokumen Kajian pendukung RIJLLAJ lanjutan dikawasan perkotaan purwokerto	Kepala Dinas	2026

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau
 Urusan Pemerintahan : Perhubungan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Dokumen hasil Survey rute angkutan umum terbaru sesuai kebutuhan masyarakat wil. kab bms (perkotaan)	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I		
2	Dokumen Kajian pendukung RIJLLAJ lanjutan dikawasan perkotaan purwokerto	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	Pegawai Dinas Perhubungan	Triwulan I		

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau
 Urusan Pemerintahan : Perhubungan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Dokumen hasil Survey rute angkutan umum terbaru sesuai kebutuhan masyarakat wil. kab bms (perkotaan)	Rapat Koordinasi Persiapan Pemantauan RTP	Kepala Dinas	Triwulan I		
2	Dokumen Kajian pendukung RIJLLAJ lanjutan dikawasan perkotaan purwokerto	Rapat Koordinasi Persiapan Pemantauan RTP	Kepala Dinas	Triwulan I		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau
 Urusan Pemerintahan : Perhubungan

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Belum meratanya pemenuhan rute dan angkutan yang dibutuhkan masyarakat di wil. bms					Dokumen hasil Survey rute angkutan umum terbaru sesuai kebutuhan masyarakat wil. kab bms (perkotaan)	Triwulan IV		
2	Masih terdapat ruas jalan di Kabupaten Banyumas yang mengalami kepadatan tinggi					Dokumen Kajian pendukung RIJLLAJ lanjutan dikawasan perkotaan purwokerto	Triwulan IV		